



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN
TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan;
- b. bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang telah berakhir masa berlakunya;
- c. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia masih terjadi ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dan masih membutuhkan waktu tambahan untuk industri dalam negeri melakukan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa produk karpét dan tekstil penutup lantai lainnya yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp 74.461/meter persegi
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	Rp 71.058/meter persegi
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	Rp 67.811/meter persegi

Pasal 3

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari:

- bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
- bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Pasal 4

- Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya dari semua negara.
- Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 7

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI
LAINNYA

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL
PENUTUP LANTAI LAINNYA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	25.	Congo
2.	Albania	26.	Costa Rica
3.	Angola	27.	Côte d’Ivoire
4.	Antigua and Barbuda	28.	Cuba
5.	Argentina	29.	Democratic Republic of the Congo
6.	Armenia	30.	Djibouti
7.	Bahrain, Kingdom of	31.	Dominica
8.	Bangladesh	32.	Dominican Republic
9.	Barbados	33.	Ecuador
10.	Belize	34.	Egypt
11.	Benin	35.	El Salvador
12.	Bolivia, Plurinational State of	36.	Eswatini
13.	Botswana	37.	Fiji
14.	Brazil	38.	Gabon
15.	Brunei Darussalam	39.	Gambia
16.	Burkina Faso	40.	Georgia
17.	Burundi	41.	Ghana
18.	Cabo Verde	42.	Grenada
19.	Cambodia	43.	Guatemala
20.	Cameroon	44.	Guinea
21.	Central African Republic	45.	Guinea-Bissau
22.	Chad	46.	Guyana
23.	Chile	47.	Haiti
24.	Colombia	48.	Honduras

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
49.	Hong Kong, China	84.	Panama
50.	India	85.	Papua New Guinea
51.	Israel	86.	Paraguay
52.	Jamaica	87.	Peru
53.	Jordan	88.	Philippines
54.	Kazakhstan	89.	Qatar
55.	Kenya	90.	Russian Federation
56.	Korea, Republic of	91.	Rwanda
57.	Kuwait, the State of	92.	Saint Kitts and Nevis
58.	Kyrgyz Republic	93.	Saint Lucia
59.	Lao People's Democratic Republic	94.	Saint Vincent & the Grenadines
60.	Lesotho	95.	Samoa
61.	Liberia	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
62.	Liechtenstein	97.	Senegal
63.	Macao, China	98.	Seychelles
64.	Madagascar	99.	Sierra Leone
65.	Malawi	100.	Singapore
66.	Maldives	101.	Solomon Islands
67.	Mali	102.	South Africa
68.	Mauritania	103.	Sri Lanka
69.	Mauritius	104.	Suriname
70.	Mexico	105.	Chinese Taipei
71.	Moldova, Republic of	106.	Tajikistan
72.	Montenegro	107.	Tanzania
73.	Mongolia	108.	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
74.	Morocco	109.	Togo
75.	Mozambique	110.	Tonga
76.	Myanmar	111.	Trinidad and Tobago
77.	Namibia	112.	Tunisia
78.	Nepal	113.	Uganda
79.	Nicaragua	114.	Ukraine
80.	Niger	115.	United Arab Emirates
81.	Nigeria	116.	Uruguay
82.	Oman	117.	Vanuatu
83.	Pakistan	118.	Venezuela, Bolivarian Republic of

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
119.	Yemen	121.	Zimbabwe
120.	Zambia		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI



REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2024
ABOUT
IMPOSITION OF IMPORT DUTY SAFETY MEASURES
REGARDING THE IMPORT OF CARPET AND PRODUCTS
OTHER FLOOR COVERING TEXTILE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

- Considering: a. that based on the provisions of Article 70 of Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Compensatory Measures and Trade Security Measures, imported goods, in addition to being subject to import duties, may be subject to security measures in the form of imposition of security measure import duties;
- b. that the imposition of security measures import duties on imported goods in the form of carpet products and other floor covering textiles has been regulated in the Minister of Finance Regulation Number 10/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Safeguard Measures Import Duties on Imports of Carpet Products and Other Floor Covering Textiles as has been done several times. last amended by Regulation of the Minister of Finance Number 74 of 2023 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 10/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Security Measures Import Duty on Imports of Carpet and Other Floor Covering Textile Products whose validity period has expired;
- c. that according to the results of the investigation by the Indonesian Trade Security Committee, there is still a threat of serious losses experienced by the domestic industry and that additional time is still needed for the domestic industry to make structural adjustments, so it is necessary to impose import duties as security measures on imported goods in the form of carpet and textile covering products. other floors;

- d. that based on the considerations as intended in letters a, b and c, as well as to implement the provisions of Article 23D paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, it is necessary to stipulate a Ministerial Regulation Finance regarding Imposition of Safeguard Measures Import Duty on Imports of Carpet and Other Floor Covering Textile Products;

Bearing in mind: 1. Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

2. Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
3. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
4. Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Compensatory Measures and Trade Security Measures (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5225);
5. Presidential Regulation Number 57 of 2020 concerning the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 98);
6. Minister of Finance Regulation Number 118/PMK.01/2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 1031) as amended several times, most recently by Minister of Finance Regulation Number 135 of 2023 concerning the Second Amendment to Ministerial Regulations Finance Number 118/PMK.01/2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 977);

DECIDE:

To stipulate: REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE CONCERNING THE IMPOSITION OF IMPORT DUTY MEASURES OF SAFETY ON THE IMPORT OF CARPET AND OTHER FLOOR COVERING TEXTILE PRODUCTS.

article 1

Imported goods in the form of carpet products and other floor covering textiles which are included in tariff post Chapter 57 as stated in the Ministerial Regulation concerning the determination of the goods classification system and the imposition of import duties on imported goods, are subject to Safeguard Measures Import Duty.

Section 2

Safeguard Import Duty as intended in Article 1 is imposed for 3 (three) years with the following conditions:

No.	Imposition Period	Amount of Import Duty Action Security
1.	First Year, with a period of (one) year starting from the effective date ¹ of this Ministerial Regulation.	IDR 74,461/square meter
2.	Second Year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the First Year.	IDR 71,058/square meter
3.	Third Year, with a period of 1 (one) year starting from the end date of the Second Year.	IDR 67,811/square meter

Article 3

The imposition of Safeguard Measures Import Duty as intended in Article 1 is in addition to:

- a. general import duties (*Most Favored Nation*); or
- b. preferential import duties based on international treaties or agreements,

that has been worn.

Article 4

- (1) Safeguard Import Duty as intended in Article 1 is imposed on the import of carpet products and other floor covering textiles from all countries.
- (2) The imposition of Safeguard Measures Import Duty as intended in paragraph (1), is excluded on the import of carpet products and other floor covering textiles originating from countries as listed in the Attachment which is an inseparable part of this Ministerial Regulation.

Article 5

- (1) Importers are required to submit certificate of origin documents *for* imports of carpet products and other floor covering textiles originating from countries that are exempt from the imposition of Safeguard Measures Import Duty as intended in Article 4 paragraph (2).

(2) In the case of imports as intended in paragraph (1) using a preferential certificate of origin , the imported goods are required to comply with the provisions on the origin of goods based on international treaties or agreements.

(3) Provisions on the origin of goods as intended in paragraph (2) include:

- a. goods origin criteria (*origin criteria*);
 - b. delivery criteria (*consignment criteria*); And
 - c. procedural provisions (*procedural provisions*).
- (4) Examination of the preferential certificate *of origin* as intended in paragraph (2), is carried out based on the provisions of the laws and regulations governing the imposition of import duties on imported goods based on international treaties or agreements.

(5) In the event that the certificate *of origin* as intended in paragraph (1) uses a non-preferential certificate of origin , research on the certificate of origin *is* carried out based on the provisions of the laws and regulations in the field of trading.

Article 6

(1) In the event that the import of carpet products and other floor covering textiles originating from a country which is exempt from the imposition of Safeguard Import Duty as intended in Article 4 paragraph (2) does not fulfill the provisions as intended in Article 5, the importation of Safeguard Measure Import Duty is levied. .

(2) In the event that a certificate of origin as intended in Article 5 paragraph (2) is being requested for a *retroactive check*, on the import of carpet products and other floor covering textiles originating from countries which are exempt from the imposition of Safeguard Measures Import Duty as intended in Article 4 paragraph (2), is subject to Safeguard Measures Import Duty.

Article 7

- (1) The amount of Safeguard Measures Import Duty as intended in Article 2 applies to imported goods of carpet products and other floor covering textiles which:
- a. the import customs notification document has received a registration number from the customs office where the customs obligation is settled, in the event that the settlement of the customs obligation is carried out by submitting a customs notification; or
 - b. The tariff and customs value are determined by the customs office where the customs obligation is settled, in the event that the customs obligation is settled without submitting a customs notification.

- (2) The entry and/or release of goods into and from free trade areas and free ports, bonded storage places, or special economic zones, is carried out in accordance with the provisions of the laws governing the entry and/or release of goods into and from trade areas, free and free ports, bonded storage areas, or special economic zones.

Article 8

This Ministerial Regulation comes into force after 10 (ten) working days from the date of promulgation.

So that everyone is aware, this Ministerial Regulation is ordered to be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.



Stipulated in Jakarta on July
23 2024

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Promulgated in Jakarta on

PLT. DIRECTOR GENERAL OF
LEGAL REGULATIONS MINISTRY OF LAW AND
HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

STATE NEWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2024 NUMBER

ATTACHMENT
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2024
ABOUT
IMPOSITION OF IMPORT DUTY SAFETY MEASURES AGAINST
IMPORT OF CARPET AND TEXTILE FLOOR COVERING PRODUCTS
OTHER

LIST OF COUNTRIES EXCLUDED FROM IMPOSITION
IMPORT DUTY SECURITY MEASURES AGAINST
IMPORT OF CARPET AND TEXTILE PRODUCTS
OTHER FLOOR COVERINGS

NO.	COUNTRY NAME	NO.	COUNTRY NAME
1.	Afghanistan	25.	Congo
2.	Albania	26.	Costa Rica
3.	Angola	27.	Côte d'Ivoire
4.	Antigua and Barbuda	28.	Cuba
5.	Argentina	29.	Democratic Republic of the Congo
6.	Armenia	30.	Djibouti
7.	Bahrain, Kingdom of	31.	Dominica
8.	Bangladesh	32.	Dominican Republic
9.	Barbados	33.	Ecuador
10.	Belize	34.	Egypt
11.	Benin	35.	El Salvador
12.	Bolivia, Plurinational State of	36.	Eswatini
13.	Botswana	37.	Fiji
14.	Brazil	38.	Gabon
15.	Brunei Darussalam	39.	Gambia
16.	Burkina Faso	40.	Georgia
17.	Burundi	41.	Ghana
18.	Cabo Verde	42.	Grenada
19.	Cambodia	43.	Guatemala
20.	Cameroon	44.	Guinea
21.	Central African Republic	45.	Guinea-Bissau
22.	Chad	46.	Guiana
23.	Chile	47.	Haiti
24.	Colombia	48.	Honduras

NO.	COUNTRY NAME	NO.	COUNTRY NAME
49.	Hong Kong, China	84.	Panama
50.	India	85.	Papua New Guinea
51.	Israel	86.	Paraguay
52.	Jamaica	87.	Peru
53.	Jordan	88.	Philippines
54.	Kazakhstan	89.	Qatar
55.	Kenya	90.	Russian Federation
56.	Korea, Republic of	91.	Rwanda
57.	Kuwait, the State of	92.	Saint Kitts and Nevis
58.	Kyrgyz Republic	93.	Saint Lucia
59.	Lao People's Democratic Republic	94.	Saint Vincent & the Grenadines
60.	Lesotho	95.	Samoa
61.	Liberia	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
62.	Liechtenstein	97.	Senegal
63.	Macao, China	98.	Seychelles
64.	Madagascar	99.	Sierra Leone
65.	Malawi	100.	Singapore
66.	Maldives	101.	Solomon Islands
67.	Mali	102.	South Africa
68.	Mauritania	103.	Sri Lanka
69.	Mauritius	104.	Suriname
70.	Mexico	105.	Chinese Taipei
71.	Moldova, Republic of	106.	Tajikistan
72.	Montenegro	107.	Tanzania
73.	Mongolia	108.	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
74.	Morocco	109.	Togo
75.	Mozambique	110.	Tonga
76.	Myanmar	111.	Trinidad and Tobago
77.	Namibia	112.	Tunisia
78.	Nepal	113.	Uganda
79.	Nicaragua	114.	Ukraine
80.	Niger	115.	United Arab Emirates
81.	Nigeria	116.	Uruguay
82.	Oman	117.	Vanuatu
83.	Pakistan	118.	Venezuela, Bolivarian Republic of

NO.	COUNTRY NAME	NO.	COUNTRY NAME
119.	Yemen	121.	Zimbabwe
120.	Zambia		

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed.

SRI MULYANI INDRAWATI